KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

HRLNHUCO

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

#										
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 N	A.1 NPWP : 68 807 544 9 722 000									
A.2 NIK :										
A.3 Nama : ENIK SOEDIJANTI										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7			
4 21-402-01			1.186.500	1.186.500	0	15	177.975			
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen										
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 2 8 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :				9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 C.4	C.4. Tanggal		2 8	dd 0 4 mm						
C.5	·			dd 0 4 mm IUMADI	2 0 2 2 уууу					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Den			Dengan	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya andatangani secara elektronik.						
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	s mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara		